

PORTOFOLIO
PEMERIKSAAN AKUNTANSI

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Oleh:

Mar'atus Shalihah

2313031025

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga portofolio ini dapat diselesaikan dengan baik. Portofolio Pemeriksaan Akuntansi ini disusun sebagai tugas akhir yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai informasi terkait pemeriksaan akuntansi dari beragam sumber, baik berupa jurnal ilmiah, artikel, maupun laporan keuangan resmi perusahaan publik.

Portofolio ini memuat analisis atas sepuluh sumber referensi yang mencakup topik-topik mutakhir dalam dunia audit dan pemeriksaan akuntansi, mulai dari kesiapan auditor menghadapi tantangan ESG disclosure, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam proses audit, audit syariah di Indonesia, peranan audit internal dalam pencegahan *Fraud* di sektor publik, hingga penelaahan langsung atas laporan auditor independen perusahaan publik. Setiap sumber dibahas secara terpisah dengan pendekatan analitis dan kritis, dengan tujuan agar penulis tidak sekadar merangkum isi referensi, melainkan juga mengembangkan pemikiran dan perspektif pribadi atas topik-topik tersebut.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga portofolio ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pemeriksaan akuntansi.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| Pembahasan Sumber 1 | 1 |
| Pembahasan Sumber 2 | 6 |
| Pembahasan Sumber 3 | 10 |
| Pembahasan Sumber 4 | 14 |
| Pembahasan Sumber 5 | 18 |
| Pembahasan Sumber 6 | 22 |
| Pembahasan Sumber 7 | 26 |
| Pembahasan Sumber 8 | 30 |
| Pembahasan Sumber 9 | 34 |
| Pembahasan Sumber 10 | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA | 42 |

PEMBAHASAN SUMBER 1

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|---|
| Judul | Audit Readiness Atas Laporan Keberlanjutan: Tantangan Baru Bagi Auditor di Era ESG Disclosure |
| Nama Jurnal | Neraca Manajemen, Ekonomi (MUSYTARI) |
| Penulis | Hana Safitri, Dermawan, Ivan Arba, dan Wahyuni. |
| Volume/Nomor | Vol. 20 No. 9 Tahun 2025 |

B. Pendahuluan

Pada saat ini perusahaan tidak hanya dituntut menyajikan laporan keuangan, tetapi juga laporan mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Di berbagai negara, termasuk Indonesia, laporan keberlanjutan mulai menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam proses audit karena pemeriksaan tidak lagi hanya berfokus pada angka-angka keuangan, tetapi juga pada informasi nonkeuangan yang lebih luas dan kompleks.

Kesiapan auditor untuk menghadapi tantangan ini disebut dengan istilah audit *readiness*. Topik ini menjadi sangat relevan karena di satu sisi regulasi terus mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, tetapi di sisi lain kapasitas auditor dalam memverifikasi laporan tersebut masih belum memadai. Melalui pembahasan atas sumber ini, penulis akan menelaah secara kritis sejauh mana kesiapan auditor di Indonesia dalam menghadapi era ESG *disclosure*, serta apa saja tantangan konkret yang harus segera diatasi.

C. Ringkasan Isi Sumber

Sumber ini membahas konsep audit *readiness* dalam konteks laporan keberlanjutan yang semakin menjadi keharusan di era ESG *disclosure*. Artikel ini mengulas bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang disusun perusahaan untuk mengungkapkan dampak kegiatan bisnisnya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara sistematis. Di Indonesia, kewajiban menerbitkan laporan keberlanjutan telah diatur melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Artikel ini mengidentifikasi beberapa standar internasional pelaporan keberlanjutan yang relevan, antara lain *GRI Standards (Global Reporting Initiative)*, *SASB (Sustainability Accounting Standards Board)*, dan IFRS S1 serta S2 yang baru diterbitkan oleh *International Sustainability Standards Board (ISSB)*. Berbagai standar ini menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan memiliki kerangka yang kompleks dan terus berkembang, sehingga auditor dituntut untuk memahami lebih dari satu kerangka standar sekaligus.

Penelitian ini mengkaji tingkat audit readiness dengan menelaah laporan keberlanjutan tiga perusahaan BUMN besar, yaitu BRI, Telkom, dan PGN dalam periode 2021 hingga 2023. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelaporan dari tahun ke tahun, namun juga mengungkap sejumlah kelemahan yang belum teratasi, khususnya dalam hal konsistensi pengukuran, verifikasi data ESG, dan integrasi antara informasi keuangan dan non-keuangan. Artikel ini juga menyoroti bahwa auditor di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kompetensi ESG, akses terhadap data yang andal, dan keterlibatan multidisiplin yang memadai.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Konsep audit readiness yang dibahas dalam sumber ini sesungguhnya menempatkan auditor dalam posisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan audit keuangan konvensional. Dalam audit keuangan, auditor berpegang pada standar yang relatif baku, yaitu Standar Audit (SA) yang diterbitkan oleh IAPI, dengan objek pemeriksaan berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang memiliki prinsip-prinsip pengukuran yang jelas. Namun, dalam konteks audit keberlanjutan, auditor menghadapi realitas yang berbeda: data yang diperiksa bersifat kualitatif, metode pengukurannya beragam antar perusahaan, dan standar yang berlaku pun masih dalam proses harmonisasi global.

Apa yang menarik dari analisis sumber ini adalah penekanan pada dimensi kesiapan organisasi yang diaudit (*auditee readiness*), bukan hanya kesiapan auditor. Ini mengindikasikan bahwa masalah audit readiness bukan semata-mata persoalan kompetensi auditor, melainkan juga persoalan seberapa baik perusahaan membangun sistem pengumpulan dan pengelolaan data ESG-nya. Jika perusahaan tidak memiliki infrastruktur data ESG yang memadai, maka auditor pun akan kesulitan menemukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan assurance yang berarti.

Dari sudut pandang metodologi audit, tantangan ini memunculkan pertanyaan tentang prosedur audit substantif apa yang paling tepat diterapkan dalam konteks ESG. Berbeda dengan audit laporan keuangan di mana prosedur seperti konfirmasi, rekonsiliasi, dan inspeksi dokumen sudah sangat terstandar, audit ESG memerlukan prosedur yang lebih bervariasi, termasuk kunjungan lapangan untuk memverifikasi klaim lingkungan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis data besar (*big data analytics*) untuk mengidentifikasi inkonsistensi dalam laporan. Ini adalah wilayah baru yang belum sepenuhnya terpetakan dalam standar audit yang berlaku saat ini.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Sumber ini memiliki beberapa kelebihan yang patut diapresiasi. Pertama, pendekatannya yang empiris dengan menggunakan studi kasus tiga BUMN memberikan konteks yang relevan dan membumi bagi pembaca Indonesia. Alih-alih hanya membahas teori secara abstrak, artikel ini menghadirkan data konkret tentang seberapa jauh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sudah atau belum memenuhi kriteria audit readiness. Kedua, artikel ini berhasil mengidentifikasi *gap* yang nyata antara regulasi yang mendorong penerbitan laporan keberlanjutan dengan kapasitas dunia audit yang ada, sebuah temuan yang sangat relevan bagi pengembangan kebijakan.

Di sisi kelemahan, penulis menilai bahwa artikel ini agak kurang dalam memberikan rekomendasi konkret yang dapat langsung diterapkan. Analisis tentang hambatan yang dihadapi sudah cukup tajam, namun solusi yang ditawarkan masih berada pada level konseptual, seperti 'perlu pelatihan lebih banyak' atau 'perlu harmonisasi standar', tanpa merinci roadmap yang spesifik. Selain itu, keterbatasan pada tiga perusahaan BUMN saja membuat generalisasi temuan menjadi terbatas, karena karakteristik BUMN dalam tata kelola pelaporan keberlanjutan kemungkinan berbeda signifikan dengan perusahaan swasta atau UMKM.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Relevansi sumber ini dengan praktik pemeriksaan akuntansi di Indonesia sangat tinggi. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/2017 telah mewajibkan perusahaan di sektor jasa keuangan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan, dan kewajiban ini secara bertahap diperluas ke emiten dan perusahaan publik lainnya. Artinya, dalam waktu tidak terlalu lama, laporan keberlanjutan akan menjadi objek audit yang sama normalnya dengan laporan keuangan. Jika dunia audit di Indonesia tidak bersiap dari sekarang, maka audit

keberlanjutan berisiko menjadi sekadar formalitas, bukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh bermakna.

Lebih jauh, isu ini juga berkaitan dengan integritas profesi akuntan publik di Indonesia secara keseluruhan. Jika auditor memberikan opini atas laporan keberlanjutan tanpa benar-benar memiliki kompetensi yang memadai, maka hal ini berpotensi menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya yang mengandalkan laporan tersebut dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, IAPI sebagai organisasi profesi perlu bergerak cepat dalam menyusun standar dan panduan audit keberlanjutan yang spesifik untuk konteks Indonesia.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Menurut saya, kesiapan auditor dalam menghadapi laporan keberlanjutan bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga cara berpikir auditor dalam memahami bentuk laporan yang terus berkembang. Auditor yang sebelumnya lebih banyak fokus pada angka-angka keuangan perlu mulai memahami laporan yang berisi narasi, komitmen perusahaan, dan informasi nonkeuangan lainnya. Menurut saya, perubahan ini tidak bisa dicapai hanya melalui pelatihan ESG saja, tetapi juga perlu didukung oleh pendidikan akuntansi, sertifikasi profesi, dan lingkungan kerja yang mampu mengikuti perkembangan audit keberlanjutan.

Saya juga berpendapat bahwa Indonesia sebetulnya berada di posisi yang cukup menguntungkan jika mau belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah lebih dahulu mewajibkan audit keberlanjutan, seperti negara-negara anggota Uni Eropa yang sudah menerapkan *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Dengan mempelajari hambatan dan pelajaran yang didapat dari sana, Indonesia bisa merancang kebijakan dan infrastruktur audit keberlanjutan yang lebih matang dan efisien.

Satu hal yang menjadi perhatian saya adalah risiko *greenwashing* yang tidak terdeteksi akibat lemahnya audit keberlanjutan. *Greenwashing* adalah praktik di mana perusahaan mengklaim kinerja ESG yang lebih baik dari kenyataannya, dan praktik ini sulit dideteksi jika auditor tidak memiliki kapasitas dan alat yang memadai untuk memverifikasi klaim-klaim tersebut. Dari perspektif pemeriksaan akuntansi, ini adalah risiko yang sangat serius karena dapat merusak integritas pasar modal dan kepercayaan publik terhadap laporan perusahaan secara keseluruhan.

H. Kesimpulan

Audit readiness atas laporan keberlanjutan adalah topik yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kewajiban regulasi ESG disclosure di Indonesia. Sumber ini dengan baik menggambarkan *gap* yang ada antara tuntutan regulasi dan kapasitas dunia audit yang tersedia, serta menggunakan studi kasus BUMN untuk memberikan gambaran empiris yang kontekstual. Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa tanpa investasi serius dalam pengembangan kompetensi auditor, harmonisasi standar audit keberlanjutan, dan peningkatan infrastruktur data ESG perusahaan, maka audit keberlanjutan di Indonesia berisiko tidak memberikan nilai tambah yang sesungguhnya bagi para pemangku kepentingan.

PEMBAHASAN SUMBER 2

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|---|
| Judul | Menuju Audit ESG Berkualitas dan Transparan: Optimalisasi Implementasi Audit ESG dengan <i>Robotic Process Automatization</i> |
| Nama Jurnal | Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA) |
| Penulis | Angelina Salim, Gloria Ivana Sutedjo, dan Christy Natalia Siallagan. |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Volume/Nomor | Vol. 2 No. 1 Tahun 2025, Hal. 138-153 |

B. Pendahuluan

Jika sumber sebelumnya membahas tentang kesiapan auditor menghadapi era ESG *disclosure* dari sisi kompetensi dan regulasi, maka sumber kedua ini mengambil sudut pandang yang lebih praktis dan solutif: bagaimana teknologi, khususnya *Robotic Process Automation* (RPA), dapat membantu auditor menjalankan tugasnya dalam mengaudit laporan ESG secara lebih efektif dan efisien. Ini adalah pertanyaan yang sangat relevan di era digitalisasi, di mana volume dan kompleksitas data ESG terus tumbuh sementara sumber daya auditor tetap terbatas.

RPA atau automasi proses robotik adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang yang sebelumnya dilakukan manusia. Dalam konteks audit, RPA berpotensi mengubah cara auditor mengumpulkan bukti, memverifikasi data, dan mendokumentasikan prosedur auditnya. Pertanyaannya adalah: seberapa efektif RPA dapat diterapkan dalam konteks audit ESG yang memiliki karakteristik uniknya sendiri?

C. Ringkasan Isi Sumber

Artikel ini berpijak pada fakta yang cukup mengejutkan: survei PwC tahun 2022 menemukan bahwa hanya 16 persen dari 650 perusahaan responden yang benar-benar menerapkan konsep ESG secara tepat. Fakta ini menjadi alarm bagi dunia audit karena menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan, bahkan yang mengklaim menerapkan ESG, masih belum melakukannya dengan benar. Artikel ini kemudian mengidentifikasi

tiga tantangan utama dalam audit ESG: kualitas data ESG yang rendah, ketidakmampuan memverifikasi data ESG yang dilaporkan, dan kurangnya infrastruktur data yang memadai.

Sebagai solusi, artikel ini mengajukan tiga strategi yang didukung RPA: pertama, sentralisasi data ESG dari berbagai sumber ke dalam satu platform terpusat; kedua, penguatan jejak audit (*audit trails*) untuk memastikan keterlacakan dan verifikasi setiap perubahan data; dan ketiga, validasi data melalui pengujian otomatis berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui literature review, artikel ini menyimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas dan reliabilitas audit ESG.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari perspektif pemeriksaan akuntansi, kontribusi terpenting dari artikel ini adalah penerjemahan konsep teknologi RPA ke dalam bahasa dan kebutuhan audit yang konkret. Sentralisasi data, misalnya, secara langsung menjawab salah satu hambatan terbesar dalam audit ESG, yaitu data yang tersebar, tidak konsisten, dan sulit diakses. Dalam praktik audit konvensional, auditor sering menghabiskan waktu yang tidak sedikit hanya untuk mengumpulkan dan merekonsiliasi data dari berbagai sumber. RPA dapat mengotomatisasi proses ini sehingga auditor dapat mengalihkan energinya ke analisis yang lebih bernilai tambah.

Konsep jejak audit dalam konteks ESG juga sangat penting untuk ditekankan. Dalam audit keuangan, jejak audit sudah menjadi sesuatu yang diterima begitu saja, yaitu setiap transaksi dapat ditelusuri dari dokumen sumber hingga ke laporan akhir. Namun dalam audit ESG, keterlacakan ini jauh lebih lemah karena banyak data ESG dikumpulkan melalui survei internal, estimasi, atau pengukuran yang metodologinya tidak selalu transparan. RPA dapat membantu membangun jejak audit yang lebih kuat dengan mendokumentasikan secara otomatis setiap tahap pengumpulan, pengolahan, dan validasi data ESG.

Validasi data melalui RPA juga membuka kemungkinan yang menarik dalam hal deteksi inkonsistensi dan anomali. Jika sistem RPA diprogram dengan parameter-parameter yang mencerminkan standar ESG yang berlaku, maka sistem tersebut dapat secara otomatis menandai data yang tidak konsisten atau tidak memenuhi ambang batas tertentu, sebuah fungsi yang sangat berguna dalam mengidentifikasi risiko *greenwashing*.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan utama artikel ini adalah sifatnya yang sangat praktis dan solutif. Di tengah banyaknya tulisan akademis yang lebih banyak mendeskripsikan masalah daripada menawarkan solusi, artikel ini berani mengajukan pendekatan teknologi yang spesifik dan terukur. Penggunaan tiga pilar solusi (sentralisasi, jejak audit, validasi data) memberikan kerangka yang mudah dipahami dan berpotensi diterapkan secara nyata oleh kantor akuntan publik yang ingin memodernisasi layanan audit ESG-nya.

Namun, kelemahan yang paling mencolok adalah keterbatasan metode literature review yang digunakan. Karena tidak ada data empiris yang dikumpulkan langsung dari lapangan, kesimpulan artikel ini bersandar sepenuhnya pada temuan-temuan penelitian sebelumnya yang mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks Indonesia. Implementasi RPA dalam audit ESG di negara-negara maju tentu memiliki kondisi prasyarat yang berbeda, seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, keahlian sumber daya manusia, dan regulasi data yang mendukung, yang belum tentu mudah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Relevansi artikel ini dengan praktik audit di Indonesia berada pada dua level. Pada level konseptual, artikel ini memberi inspirasi bagi profesi auditor di Indonesia untuk mulai memikirkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam praktik audit ESG. Ini penting karena adopsi teknologi dalam audit di Indonesia masih relatif lambat dibandingkan dengan negara-negara maju. Pada level praktis, implementasi RPA dalam audit ESG di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital perusahaan, kurangnya tenaga ahli yang memahami sekaligus audit dan teknologi RPA, hingga belum adanya standar teknis yang mengatur penggunaan RPA dalam proses audit.

Meski demikian, tren digitalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia memberi harapan bahwa hambatan-hambatan ini bersifat sementara. Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi dan berkembangnya perusahaan-perusahaan teknologi akuntansi (*accounting tech*), adopsi RPA dalam audit ESG di Indonesia mungkin tidak lagi menjadi wacana dalam beberapa tahun ke depan.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Saya berpandangan bahwa artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam mengisi kesenjangan antara wacana ESG dan praktik audit yang nyata. Namun, ada satu dimensi yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih, yaitu aspek keamanan dan privasi data dalam implementasi RPA untuk audit ESG. Data ESG sering kali mengandung informasi sensitif tentang operasi perusahaan, rantai pasok, dan kondisi ketenagakerjaan. Ketika data-data ini dikumpulkan dan diproses secara otomatis oleh sistem RPA, muncul pertanyaan tentang siapa yang memiliki akses, bagaimana data tersebut dilindungi, dan apa konsekuensinya jika terjadi kebocoran data.

Selain itu, saya juga melihat bahwa keberhasilan implementasi RPA dalam audit ESG sangat bergantung pada kualitas desain sistem yang mendasarinya. Jika sistem RPA tidak dirancang dengan baik, hasil pemeriksaannya juga bisa kurang akurat dan justru menimbulkan kesalahan baru, ini menjadi sebuah risiko yang tidak kalah berbahaya dibandingkan dengan tidak menggunakan RPA sama sekali. Oleh karena itu, kompetensi manusia dalam merancang, memprogram, dan mengawasi sistem RPA tetap menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan.

H. Kesimpulan

Artikel ini menawarkan perspektif yang segar dan solutif tentang bagaimana teknologi RPA dapat memperkuat kualitas audit ESG. Dengan mengajukan tiga strategi konkret yaitu sentralisasi data, penguatan jejak audit, dan validasi data otomatis, artikel ini memberi arah yang jelas bagi profesi audit dalam menghadapi tantangan kompleksitas data ESG. Bagi Indonesia yang sedang dalam fase transisi menuju kewajiban pelaporan ESG yang lebih komprehensif, gagasan dalam artikel ini layak menjadi bahan diskusi serius di kalangan regulator, profesi akuntan publik, dan komunitas akademis.

PEMBAHASAN SUMBER 3

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|--|
| Judul | Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit terhadap Audit Delay: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan ke BEI Tahun 2020-2023 |
| Penulis | Afifah Nazhirah Putri Ray, dan Salma Taqwa. |
| Nama Jurnal | Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Volume/Nomor | Vol. 7, No 2, Mei 2025, Hal 690-706 |

B. Pendahuluan

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah salah satu atribut kualitas informasi yang paling fundamental dalam akuntansi dan pasar modal. Investor, kreditur, dan regulator mengandalkan laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu untuk membuat keputusan yang akurat dan relevan. Namun dalam praktiknya, proses audit yang diperlukan sebelum laporan keuangan dapat dipublikasikan sering kali memakan waktu yang bervariasi, dan keterlambatan ini dikenal dengan istilah audit delay atau audit report lag.

Audit delay bukan sekadar masalah administratif. Keterlambatan yang berlebihan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam proses audit, kondisi keuangan perusahaan yang kompleks, atau bahkan potensi perselisihan antara auditor dan manajemen perusahaan. Sumber ketiga ini meneliti secara kuantitatif bagaimana variabel profitabilitas, solvabilitas, dan jenis opini audit mempengaruhi lamanya audit delay pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh tiga variabel independen terhadap audit delay. *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai proksi profitabilitas, *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai proksi

solvabilitas, dan jenis opini audit (wajar tanpa pengecualian vs. selain itu) sebagai variabel kategoris.

Dari analisis data atas 304 observasi, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, artinya perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menyelesaikan proses auditnya lebih cepat. Solvabilitas ditemukan berpengaruh positif terhadap audit delay, yang berarti semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, semakin panjang audit delay yang terjadi. Adapun opini audit ditemukan berpengaruh positif terhadap audit delay, yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerima opini selain WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) cenderung mengalami proses audit yang lebih panjang.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Temuan penelitian ini sesungguhnya sangat intuitif jika dilihat dari sudut pandang proses audit. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi pada umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat, sistem pengendalian internal yang lebih baik, dan manajemen yang lebih kooperatif terhadap proses audit. Kondisi-kondisi ini secara alami mempercepat proses pengumpulan bukti audit dan penyelesaian prosedur audit. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi memiliki risiko audit yang lebih besar karena auditor perlu melakukan prosedur yang lebih ekstensif untuk menilai *going concern* dan memverifikasi kewajiban-kewajiban yang kompleks.

Temuan tentang pengaruh opini audit terhadap audit delay sangat menarik dari perspektif pemeriksaan. Opini selain WTP mengindikasikan bahwa auditor menemukan masalah material dalam laporan keuangan, yang berarti terjadi negosiasi dan diskusi intensif antara auditor dan manajemen sebelum laporan audit akhirnya diterbitkan. Proses negosiasi ini, yang dalam bahasa audit disebut 'management representation' dan 'resolution of audit differences', dapat memakan waktu yang cukup signifikan dan berkontribusi pada perpanjangan audit delay.

Lebih jauh, penelitian ini secara implisit juga menggambarkan bagaimana risiko perusahaan mempengaruhi perilaku auditor. Ketika auditor menghadapi klien dengan risiko tinggi, baik risiko keuangan (solvabilitas rendah) maupun risiko pelaporan (potensi opini modifikasi), mereka secara profesional diwajibkan untuk meningkatkan skeptisisme dan memperluas prosedur auditnya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor perlu bekerja lebih hati-hati ketika menghadapi perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kekuatan penelitian ini terletak pada pendekatan empirisnya yang solid dengan sampel yang cukup besar, yaitu 304 observasi. Penggunaan regresi linier berganda memungkinkan peneliti untuk mengisolasi pengaruh masing-masing variabel secara lebih akurat. Hasil yang ditemukan juga konsisten dengan teori-teori yang sudah ada dan dengan temuan penelitian serupa di berbagai negara, sehingga memperkuat validitas eksternalnya.

Kelemahan yang cukup terlihat dari penelitian ini adalah variabel yang digunakan masih terbatas. Audit delay dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi, kualitas pengendalian internal, pengalaman auditor, dan jadwal pekerjaan kantor akuntan publik. Menurut saya, penelitian ini masih belum memasukkan beberapa faktor lain yang juga dapat memengaruhi keterlambatan audit, sehingga hasilnya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, penggunaan ROA dan DAR sebagai proksi tunggal untuk profitabilitas dan solvabilitas juga terlalu menyederhanakan realitas yang lebih kompleks.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Penelitian ini sangat relevan bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bapepam-LK (sekarang OJK) telah menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang diaudit, dan keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi administratif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi audit delay, baik perusahaan maupun kantor akuntan publik dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Misalnya, perusahaan dengan tingkat hutang tinggi dapat mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan lebih awal, sementara kantor akuntan publik dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk klien berisiko tinggi.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Menurut saya, ada satu dimensi yang perlu mendapat perhatian lebih dalam diskusi tentang audit delay, yaitu dinamika hubungan antara auditor dan klien. Pada dasarnya, audit delay yang panjang tidak selalu mencerminkan ketidakefisienan auditor. Seringkali, perpanjangan waktu audit disebabkan oleh resistensi manajemen dalam menyediakan informasi yang diminta, perselisihan atas perlakuan akuntansi tertentu, atau kebutuhan auditor untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga seperti ahli penilaian. Faktor-faktor kualitatif ini sulit ditangkap oleh model regresi, namun sangat penting untuk dipahami dalam konteks pemeriksaan akuntansi yang sesungguhnya.

Saya juga melihat bahwa terdapat *trade-off* antara kecepatan dan kualitas dalam proses audit. Tekanan untuk menyelesaikan audit lebih cepat dapat mendorong auditor untuk mengurangi prosedur auditnya, yang pada akhirnya menurunkan kualitas audit. Ini adalah risiko nyata, apalagi di Indonesia, di mana persaingan antar kantor akuntan publik cukup ketat dan kadang mendorong mereka menawarkan harga lebih murah dan waktu lebih singkat demi mendapatkan klien.

H. Kesimpulan

Penelitian tentang audit delay ini memberikan wawasan empiris yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya proses audit. Temuan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif sementara solvabilitas dan opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay sejalan dengan logika praktik audit dan teori risiko. Bagi praktisi, temuan ini dapat dijadikan panduan dalam perencanaan audit yang lebih baik, sementara bagi regulator, temuan ini memberikan dasar empiris untuk merancang kebijakan pelaporan yang lebih realistis.

PEMBAHASAN SUMBER 4

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|--|
| Judul | Sharia Audit in Indonesia: Implementation, Challenges, And Prospects |
| Penulis | Andueriganta Fadhlihi, Fenni Yufantria, Citra Etika |
| Nama Jurnal | Perisai: Islamic Banking and Finance Journal |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Volume/Nomor | Vol 9 (2), October 2025, Hal 139-157 |

B. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 200 juta penduduk beragama Islam. Fakta demografis ini menjadi fondasi bagi berkembangnya industri keuangan syariah yang pesat di Indonesia, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, hingga lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Di balik perkembangan yang menggembirakan ini, ada satu pertanyaan yang sering luput dari perhatian: apakah sistem pengawasan dan audit yang ada sudah cukup menjamin bahwa operasional lembaga-lembaga tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

Audit syariah, atau sharia audit, adalah mekanisme pemeriksaan yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ini bukan sekadar audit keuangan biasa, karena selain memeriksa kebenaran laporan keuangan, audit syariah juga harus menilai kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan prinsip-prinsip muamalah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), dan praktik-praktik haram lainnya.

C. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi audit syariah dilakukan di Indonesia, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana prospeknya ke depan. Melalui kajian literatur yang komprehensif, artikel ini mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam perkembangan audit syariah di Indonesia: lemahnya regulasi terkait audit syariah, jumlah dan kompetensi auditor syariah yang terbatas, serta belum adanya standar audit syariah yang komprehensif dan terharmonisasi.

Artikel ini membedakan antara dua jenis audit syariah: audit internal yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan dukungan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan syariah, namun efektivitasnya sering terbatas karena anggotanya lebih banyak memiliki keahlian di bidang fiqh muamalah daripada teknik audit. Artikel ini juga membandingkan kerangka audit syariah Indonesia dengan praktik di negara-negara lain seperti Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari sudut pandang pemeriksaan akuntansi, audit syariah menghadirkan tantangan metodologis yang unik. Dalam audit keuangan konvensional, auditor berpegang pada standar akuntansi dan standar audit yang sudah terstandarisasi secara internasional. Namun dalam audit syariah, auditor juga harus berpedoman pada fatwa-fatwa DSN yang dapat berubah seiring perkembangan produk dan praktik keuangan, serta interpretasi hukum Islam yang terkadang berbeda-beda antar ulama dan lembaga fatwa. Akibatnya, penentuan apakah suatu praktik benar-benar sesuai syariah terkadang masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Lebih jauh, objek pemeriksaan dalam audit syariah jauh lebih luas dari sekedar transaksi keuangan. Auditor syariah juga perlu memeriksa apakah akad-akad (kontrak) yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, apakah terdapat unsur riba dalam penghitungan bagi hasil, dan apakah dana-dana yang dikelola tidak tercampur antara yang halal dan yang haram. Aspek terakhir ini, yang dikenal dengan istilah *fund commingling*, adalah salah satu tantangan terbesar dalam audit lembaga keuangan syariah yang juga menjalankan operasi konvensional.

Satu isu yang menurut penulis sangat krusial adalah pertanyaan tentang independensi auditor syariah. DPS yang secara teoritis berperan sebagai pengawas syariah sering kali juga memberikan konsultasi kepada lembaga yang diawasinya, sehingga memunculkan potensi konflik kepentingan yang serius. Ini adalah masalah yang analog dengan debat lama tentang *independence in mind vs. independence in appearance* dalam audit konvensional, namun dengan kompleksitas tambahan berupa otoritas religius.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan artikel ini adalah cakupannya yang komprehensif dalam memetakan kondisi audit syariah di Indonesia. Dengan membandingkan berbagai sumber dan penelitian

sebelumnya, artikel ini memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang kondisi terkini audit syariah di Indonesia, termasuk perbandingan dengan praktik internasional yang memberikan perspektif lebih luas. Penggunaan bahasa Inggris juga memperluas jangkauan pembaca sehingga temuan-temuannya dapat diakses oleh komunitas akademis internasional.

Kelemahan yang paling mencolok adalah kurangnya data empiris yang segar. Sebagai literature review, artikel ini banyak bergantung pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mungkin sudah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini industri keuangan syariah Indonesia yang berkembang sangat cepat. Selain itu, rekomendasi yang diberikan masih cukup umum dan belum memberikan panduan pelaksanaan yang spesifik dan actionable (bisa langsung diterapkan).

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Relevansi topik ini sangat tinggi mengingat Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menetapkan berbagai target pengembangan industri keuangan syariah. Namun, tanpa sistem audit syariah yang kuat dan kredibel, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah akan terus rentan. Paradoksnya, justru karena lembaga keuangan syariah beroperasi dengan klaim kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, standar akuntabilitas yang diharapkan masyarakat pun menjadi lebih tinggi.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Menurut saya, tantangan terbesar audit syariah di Indonesia bukan pada aspek teknis auditnya, melainkan pada ketidakjelasan definisi 'kepatuhan syariah' itu sendiri. Berbeda dengan standar akuntansi yang dinyatakan dalam angka dan rasio yang terukur, kepatuhan syariah sering kali bersifat kualitatif dan interpretatif. Tanpa standar syariah audit yang komprehensif dan diterima secara luas, hasil audit syariah akan terus beragam dan sulit diperbandingkan.

Saya juga baru menyadari setelah membaca artikel ini bahwa ternyata ada celah yang cukup besar antara aturan yang dibuat DSN-MUI dengan pengawasan yang dilakukan OJK di lapangan. Gap ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang secara formal memenuhi syarat syariah namun secara substansi menyimpang dari nilai-nilai dasar hukum Islam.

H. Kesimpulan

Audit syariah di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan yang memerlukan banyak perhatian dan pembenahan. Sumber ini memberikan peta yang cukup komprehensif tentang kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, dan arah pengembangan yang diperlukan. Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi auditor syariah, harmonisasi standar, dan penguatan independensi DPS adalah prioritas-prioritas yang tidak dapat lagi ditunda jika Indonesia serius ingin membangun industri keuangan syariah yang kredibel dan terpercaya.

PEMBAHASAN SUMBER 5

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|---|
| Judul | Optimalisasi Peran Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam Pencegahan <i>Fraud</i> di Sektor Publik Indonesia: Studi Komparatif dan Analisis Model |
| Penulis | Dito Aditia Darma Nst, Tri Hayati, Raihatunnisa Bangun, Muhammad Arsyad Hawari Muchsin, dan Glen Hasian Marpaung |
| Nama Jurnal | Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan |
| Tahun Terbit | 2026 |
| Volume/Nomor | Vol 6, Nomor 1, April 2026 |

B. Pendahuluan

Fraud atau kecurangan di sektor publik Indonesia bukan sekadar masalah hukum atau keuangan, melainkan sudah menjadi ancaman sistemik yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menunjukkan bahwa penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan anggaran negara masih terjadi dalam skala yang mengkhawatirkan. Di tengah realitas ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah: seberapa efektif mekanisme audit internal dan pengendalian internal yang ada dalam mencegah *Fraud*?

Sumber kelima ini mengambil topik tersebut sebagai fokus utamanya dengan pendekatan studi komparatif yang mencoba mengidentifikasi model pencegahan *Fraud* yang optimal untuk konteks sektor publik Indonesia. Ini adalah topik yang sangat relevan dan memiliki implikasi kebijakan yang sangat nyata.

C. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini mengakui bahwa *Fraud* merupakan ancaman serius bagi sektor publik yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari korupsi, penggelapan aset, hingga manipulasi laporan keuangan. Artikel ini menelaah dua mekanisme utama pencegahan *Fraud*: audit internal yang berfungsi sebagai mata dan telinga organisasi dalam mendeteksi

dan mencegah penyimpangan, serta pengendalian internal yang berfungsi sebagai pagar yang mencegah terjadinya peluang kecurangan.

Dalam analisisnya, penelitian ini merujuk pada kerangka *Fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey, yang mengidentifikasi tiga elemen yang mendorong terjadinya *Fraud*: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Audit internal dan pengendalian internal terutama berperan dalam menekan elemen 'kesempatan' dengan menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Penelitian ini juga menyebutkan faktor-faktor yang mengoptimalkan peran keduanya, termasuk kualitas sumber daya manusia, dukungan pimpinan organisasi, dan ketepatan metodologi yang digunakan.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari sudut pandang pemeriksaan, artikel ini menyoroti perbedaan penting antara audit internal yang reaktif dan yang proaktif. Audit internal yang reaktif hanya merespons setelah ada indikasi atau laporan kecurangan, sementara audit internal yang proaktif secara aktif mengidentifikasi risiko-risiko *Fraud* bahkan sebelum kecurangan terjadi. Dalam konteks sektor publik, pendekatan proaktif ini jauh lebih efektif tetapi juga jauh lebih menuntut dari sisi kapasitas auditor internal.

Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam konteks ini sangat sentral. APIP, yang meliputi Inspektorat di berbagai level pemerintahan, secara teori adalah lini pertahanan pertama dalam pencegahan *Fraud* di sektor publik. Namun dalam praktiknya, efektivitas APIP sering kali terbatas oleh berbagai faktor: kurangnya independensi dari pimpinan yang diawasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta cakupan pemeriksaan yang terlalu luas dibandingkan kapasitas yang dimiliki.

Pengendalian internal dalam sektor publik di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kerangka SPIP ini pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip COSO (Committee of Sponsoring Organizations), yang mencakup lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tantangan implementasi SPIP yang efektif di Indonesia sangat beragam antar daerah, tergantung pada kematangan tata kelola dan komitmen pimpinan masing-masing instansi.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan sumber ini terletak pada kerangka analisisnya yang integratif, menggabungkan perspektif audit internal dan pengendalian internal dalam satu narasi yang kohesif. Pendekatan komparatif juga membantu pembaca memahami bagaimana berbagai faktor konteks berinteraksi dalam membentuk efektivitas mekanisme pencegahan *Fraud*. Artikel ini juga berhasil menghubungkan diskusi teoritis dengan realitas praktis sektor publik Indonesia, sehingga relevansinya bagi pembaca yang berprofesi sebagai aparatur pemerintah cukup tinggi.

Kelemahannya adalah kurangnya analisis kuantitatif yang dapat mengukur secara lebih presisi seberapa besar kontribusi masing-masing komponen (audit internal vs. pengendalian internal) dalam pencegahan *Fraud*. Tanpa data empiris yang kuat, kesimpulan penelitian ini lebih bersifat normatif daripada deskriptif-empiris, sehingga sulit untuk mengukur tingkat kepastiannya.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Topik ini sangat relevan mengingat Indonesia masih berjuang dengan masalah korupsi dan kecurangan di sektor publik yang telah berlangsung lama. Berbagai lembaga pengawas yang ada, mulai dari BPK, KPK, BPKP, hingga Inspektorat daerah, mencerminkan komitmen institusional yang kuat untuk memberantas *Fraud*. Namun, fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga ini kadang justru menciptakan inefficiency dan celah pengawasan yang baru.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Saya berpandangan bahwa salah satu akar masalah *Fraud* di sektor publik Indonesia yang sering diabaikan adalah budaya organisasi yang tidak kondusif untuk integritas. Sekuat apapun sistem audit internal dan pengendalian internal yang dibangun, jika budaya organisasi masih mentolerir atau bahkan mendorong perilaku tidak etis, maka mekanisme formal tersebut akan terus menemui keterbatasannya. Menurut saya, budaya anti-fraud tidak bisa dibangun hanya melalui sosialisasi saja, tetapi harus dibuktikan lewat sikap dan komitmen pimpinan dalam jangka panjang.

Saya juga berpendapat bahwa digitalisasi proses keuangan pemerintah, seperti yang sedang digalakkan melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan berbagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah, memiliki potensi besar dalam memperkuat pengendalian internal. Jejak digital yang ditinggalkan oleh setiap transaksi keuangan

membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi, asalkan sistem informasi yang digunakan dirancang dengan kontrol yang memadai dan dikelola dengan integritas.

H. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana audit internal dan pengendalian internal dapat dioptimalkan untuk mencegah *Fraud* di sektor publik Indonesia. Kesimpulan utama yang dapat dipetik adalah bahwa tidak ada satu solusi tunggal yang manjur untuk mencegah *Fraud*; yang diperlukan adalah pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan sistem yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, serta komitmen pimpinan yang konsisten dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN SUMBER 6

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|---|
| Judul | Peran Audit Internal Dalam Peningkatan Tata Kelola (<i>Good governance</i>) Sektor Publik |
| Nama Jurnal | PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi |
| Penulis | Hasman H, Yuyun Maylani Putri, Rezky Awaliah Ramadhana Arifin, Alifia Salzabila Junaedi. |
| Tahun Terbit | 2025 |
| Volume/Nomor | Vol. 17, No.3, Special Issue 2025, Halaman 2024-2035 |

B. Pendahuluan

Good governance atau tata kelola yang baik adalah cita-cita yang terus dikejar oleh organisasi sektor publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan *Good governance*, audit internal memainkan peran yang sangat strategis sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan tujuan, peraturan, dan nilai-nilai yang telah ditetapkan.

Sumber keenam ini secara khusus membahas bagaimana fungsi audit internal dapat berkontribusi pada peningkatan tata kelola di sektor publik, dengan mengintegrasikan perspektif teoritis dari teori *Good governance* dan teori keagenan (*agency theory*) untuk menjelaskan dinamika yang terjadi.

C. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan menelusuri basis data ilmiah menggunakan kata kunci terkait audit internal, *Good governance*, dan sektor publik. Temuan-temuan dari berbagai penelitian yang dikaji kemudian disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif tentang kontribusi audit internal terhadap *Good governance*.

Artikel ini mengidentifikasi tiga kontribusi utama audit internal terhadap *Good governance*: pertama, penguatan akuntabilitas publik melalui pemeriksaan yang

independen dan objektif; kedua, pencegahan *Fraud* dan manajemen risiko yang membantu organisasi menghindari penyimpangan; dan ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional melalui rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Penelitian ini juga menyoroti bahwa efektivitas kontribusi audit internal sangat ditentukan oleh derajat independensinya dari manajemen yang diawasi.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari sudut pandang pemeriksaan, artikel ini menggambarkan evolusi peran audit internal dari yang semula berfungsi sebagai 'polisi internal' yang mencari-cari kesalahan, menjadi mitra strategis yang membantu manajemen meningkatkan kinerja dan tata kelola. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan standar audit internal internasional yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), di mana audit internal kini didefinisikan sebagai 'aktivitas independen dan objektif yang memberikan keyakinan dan konsultasi'.

Dalam konteks sektor publik Indonesia, pergeseran paradigma ini masih belum sepenuhnya terwujud. Banyak unit audit internal pemerintah masih terjebak pada fungsi compliance checking yang sempit, yaitu memeriksa apakah aturan dan prosedur dipatuhi, tanpa banyak memberikan nilai tambah dalam hal penilaian risiko strategis atau konsultasi perbaikan proses. Ini adalah kesenjangan yang perlu segera diatasi jika audit internal ingin benar-benar berkontribusi pada peningkatan *Good governance*.

Keterkaitan antara audit internal dan teori keagenan juga sangat relevan dalam konteks sektor publik. Dalam teori keagenan, principal (dalam hal ini masyarakat dan parlemen) mendelegasikan kewenangan kepada agent (pemerintah dan aparaturnya) untuk mengelola sumber daya publik. Masalah keagenan muncul ketika kepentingan agent tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan principal. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent, sehingga membantu memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan sumber ini adalah penggunaan kerangka teoritis yang kuat, yaitu teori *Good governance* dan teori keagenan, untuk menganalisis fenomena audit internal di sektor publik. Kerangka teoritis ini memberikan kedalaman analitis yang lebih dari sekadar deskripsi empiris. Metode systematic literature review juga memastikan bahwa kesimpulan

yang dihasilkan didasarkan pada kumpulan bukti penelitian yang lebih luas, bukan hanya satu atau dua studi kasus.

Kelemahannya adalah bahwa *systematic literature review* sering menghasilkan kesimpulan yang sangat umum dan normatif, yang mungkin kurang berguna bagi praktisi yang membutuhkan panduan operasional yang lebih spesifik. Selain itu, kualitas kesimpulan juga sangat bergantung pada kualitas dan representativitas literatur yang dikaji, sehingga ada risiko bias seleksi.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Topik ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang dalam proses reformasi birokrasi yang masif. Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah penguatan pengawasan internal, yang berarti memperkuat kapasitas dan independensi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mendorong profesionalisasi APIP, termasuk penetapan standar audit intern pemerintah dan program peningkatan kapasitas auditor.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Menurut saya, masalah ini sudah lama terjadi dan sepertinya sulit diubah karena menyangkut struktur kekuasaan yang sudah tertanam dalam sistem pemerintahan kita. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi audit internal pemerintah di Indonesia adalah masalah struktural: auditor internal (Inspektorat) berada dalam struktur organisasi yang diawasi oleh pimpinan yang sama dengan yang mereka awasi. Kepala Inspektorat Daerah, misalnya, adalah bawahan Bupati atau Walikota, sehingga secara praktis sulit bagi Inspektorat untuk bersikap independen ketika yang perlu diperiksa adalah kebijakan atau tindakan Bupati atau Walikota itu sendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa auditor internal masih membutuhkan sistem yang lebih mendukung agar dapat bekerja secara independen. Menurut saya ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain memperkuat jalur pertanggungjawaban Inspektorat kepada DPRD atau kepada BPKP, memberikan jaminan keamanan jabatan bagi auditor internal yang melakukan pemeriksaan yang tidak menyenangkan pimpinan, serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi pelapor pelanggaran (*whistleblower*). Tanpa reformasi struktural semacam ini, upaya meningkatkan *Good governance* melalui audit internal akan terus terbentur pada hambatan sistemik yang sama.

H. Kesimpulan

Sumber ini dengan baik menggambarkan kontribusi potensial audit internal terhadap *Good governance* di sektor publik, sekaligus mengidentifikasi kondisi-kondisi yang diperlukan agar kontribusi tersebut dapat terwujud secara optimal. Kunci utamanya adalah independensi dan kompetensi auditor internal. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar aspirasi akademis tetapi kebutuhan praktis yang mendesak dalam konteks reformasi birokrasi yang sedang berlangsung.

PEMBAHASAN SUMBER 7

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|--|
| Judul | Manfaat Audit dalam Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi |
| Penulis | Mhd Erfandi, dan Rizky Herlianto. |
| Nama Jurnal | Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE) |
| Tahun Terbit | 2024 |
| Volume/Nomor | Vol. 2, No. 9, Hal. 677-682 |

B. Pendahuluan

Era digitalisasi telah mengubah secara fundamental cara organisasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi keuangan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berbasis teknologi komputer kini menjadi tulang punggung operasional keuangan hampir semua jenis organisasi, mulai dari perusahaan multinasional hingga usaha mikro. Di balik manfaat efisiensi yang ditawarkan, SIA berbasis komputer juga membawa risiko-risiko baru yang tidak ada dalam sistem manual, seperti risiko keamanan siber, risiko integritas data, dan risiko kegagalan sistem.

Dalam konteks ini, audit Sistem Informasi Akuntansi (audit SIA) muncul sebagai disiplin yang penting untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan organisasi berfungsi dengan benar, menghasilkan data yang akurat dan andal, serta terlindungi dari ancaman yang dapat mengganggu integritas informasi keuangan.

C. Ringkasan Isi Sumber

Artikel ini mengkaji peran penting Sistem Informasi Akuntansi dan audit sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi keuangan. SIA didefinisikan sebagai serangkaian catatan dan laporan terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis. Sebuah SIA yang baik, menurut artikel ini, harus memenuhi beberapa kriteria kualitas: akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan keamanan data.

Audit SIA berfungsi sebagai mekanisme verifikasi independen yang memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan benar-benar memenuhi standar kualitas tersebut. Artikel ini mengidentifikasi beberapa fungsi utama audit SIA: evaluasi pengendalian internal

sistem, verifikasi integritas data, penilaian keamanan sistem, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Gambar konseptual yang disajikan dalam artikel menggambarkan bagaimana audit SIA berbasis komputer berperan dalam siklus pengelolaan informasi akuntansi.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari perspektif pemeriksaan akuntansi, audit SIA menghadirkan dimensi yang berbeda dari audit laporan keuangan tradisional. Dalam audit laporan keuangan, fokus auditor adalah pada angka-angka yang disajikan dalam laporan. Namun dalam audit SIA, fokus auditor bergeser ke belakang layar, yaitu ke sistem yang menghasilkan angka-angka tersebut. Ini berarti auditor perlu memahami arsitektur sistem informasi, logika pemrograman, mekanisme pengendalian akses, dan prosedur *backup* dan *recovery*.

Pengendalian dalam SIA dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pengendalian umum (*general controls*) yang mencakup pengendalian terhadap lingkungan teknologi informasi secara keseluruhan, dan pengendalian aplikasi (*application controls*) yang spesifik terhadap masing-masing modul atau aplikasi yang digunakan. Auditor perlu mengevaluasi kedua jenis pengendalian ini untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang keandalan sistem informasi yang diaudit.

Yang menarik dari artikel ini adalah penekanannya pada aspek risiko teknologi informasi dalam konteks audit. Ketika sebuah organisasi mengandalkan SIA berbasis komputer untuk mengelola transaksi keuangannya, maka risiko kegagalan atau manipulasi sistem menjadi sama pentingnya dengan risiko kesalahan manusia dalam sistem manual. Auditor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi informasi yang digunakan kliennya akan memiliki kelemahan besar yang tidak disadari dalam pemeriksaannya.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan artikel ini adalah keberhasilannya dalam menjembatani dua disiplin yang sering berjalan sendiri-sendiri, yaitu akuntansi dan teknologi informasi. Dengan membahas audit SIA dalam satu kerangka yang terintegrasi, artikel ini membantu pembaca memahami mengapa kompetensi di bidang teknologi informasi menjadi semakin penting bagi auditor modern. Penjelasan tentang berbagai komponen SIA dan fungsinya juga cukup sistematis dan mudah dipahami.

Kelemahan utamanya adalah kedalaman pembahasan yang masih terbatas, terutama mengingat artikel ini hanya memiliki enam halaman. Banyak aspek audit SIA yang

penting, seperti metodologi computer-assisted audit techniques (CAATs), standar keamanan informasi (ISO 27001), atau audit terhadap sistem Enterprise Resource Planning (ERP), tidak dibahas secara memadai. Artikel ini lebih cocok sebagai pengantar awal daripada sebagai referensi yang komprehensif.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Relevansi topik ini sangat tinggi mengingat semakin meluasnya penggunaan SIA berbasis komputer di berbagai sektor di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar sudah lama menggunakan sistem ERP seperti SAP atau Oracle, sementara perusahaan menengah semakin banyak yang beralih ke solusi cloud-based accounting. Bahkan usaha mikro dan kecil pun kini mulai mengadopsi aplikasi akuntansi berbasis mobile.

Di sisi lain, kapasitas auditor Indonesia dalam melakukan audit SIA masih sangat terbatas. Kurikulum pendidikan akuntansi di banyak perguruan tinggi masih lebih berfokus pada aspek konvensional audit, dengan porsi yang relatif kecil untuk audit teknologi informasi. Ini menciptakan kesenjangan kompetensi yang perlu segera diatasi melalui pembaruan kurikulum dan program sertifikasi profesional di bidang audit sistem informasi.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Saya berpendapat bahwa audit SIA seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bidang khusus yang hanya relevan bagi auditor teknologi informasi, melainkan sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap auditor modern. Dalam dunia di mana hampir semua transaksi keuangan diproses secara digital, auditor yang tidak memahami bagaimana sistem informasi bekerja akan selalu menghadapi risiko melewatkan bukti-bukti kritis yang tersembunyi dalam lautan data digital.

Saya juga melihat bahwa perkembangan teknologi seperti *cloud computing*, *artificial intelligence*, dan *blockchain* sedang mengubah secara fundamental arsitektur SIA yang ada. Auditor perlu terus mengikuti perkembangan ini agar prosedur dan metodologi audit yang digunakan tetap relevan dan efektif. Standar audit yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas lingkungan teknologi informasi yang ada, sehingga diperlukan upaya aktif dari organisasi profesi untuk memperbarui standar dan panduan yang relevan.

H. Kesimpulan

Audit SIA adalah komponen yang semakin tidak dapat diabaikan dalam praktik audit modern. Artikel ini berhasil menggambarkan mengapa audit SIA penting dan apa saja yang dicakupnya, meskipun kedalaman pembahasannya masih terbatas. Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi audit SIA perlu menjadi prioritas bagi profesi auditor di Indonesia, mengingat cepatnya transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai sektor ekonomi.

PEMBAHASAN SUMBER 8

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------------|--|
| Judul | Implementasi Artificial Intelligence dan Automation dalam Proses Audit |
| Penulis | Sari Safitri, dan Harry Z. Soeratin |
| Nama Jurnal | Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam |
| Tahun Terbit | 2024 |
| Volume/Nomor/Tahun | Vol. 04, No. 01 September 2024, hlm. 23-33 |

B. Pendahuluan

Revolusi industri 4.0 telah membawa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dari ranah sains fiksi ke dalam realitas operasional bisnis sehari-hari. Bidang audit, yang selama ini diidentikkan dengan pekerjaan manual yang padat waktu, kini berada di ambang transformasi besar akibat kemampuan AI untuk menganalisis data dalam volume masif dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melampaui kapasitas manusia. Pertanyaan yang kini relevan bukan lagi apakah AI akan mengubah praktik audit, melainkan seberapa cepat dan sejauh apa transformasi itu akan terjadi.

Sumber kedelapan ini membahas implementasi AI dan automasi dalam proses audit dengan fokus pada efisiensi, deteksi anomali, dan implikasi bagi profesi auditor. Ini adalah topik yang sangat dinamis dan memerlukan pemikiran kritis yang cermat, karena di balik janji-janji AI yang menggiurkan, terdapat juga risiko dan keterbatasan yang perlu dipahami dengan jujur.

C. Ringkasan Isi Sumber

Artikel ini mengeksplorasi berbagai aplikasi AI dan automasi dalam proses audit, mulai dari penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, machine learning untuk mendeteksi anomali dan pola *Fraud* dalam data transaksi, hingga natural language processing untuk menganalisis dokumen-dokumen kontrak dan korespondensi. Setiap teknologi dibahas dalam kaitannya dengan tahap-tahap spesifik dalam proses audit, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, hingga pelaporan.

Salah satu aplikasi yang mendapat perhatian besar dalam artikel ini adalah penggunaan machine learning untuk deteksi *Fraud*. Dengan melatih algoritma pada data historis transaksi yang berisi pola-pola kecurangan yang pernah terjadi, sistem AI dapat secara otomatis mengidentifikasi transaksi-transaksi yang memiliki karakteristik menyimpang dari pola normal. Ini menunjukkan perubahan arah dari audit berbasis sampel (*sample-based audit*) menuju audit berbasis populasi (*population-based audit*), di mana seluruh data dapat diperiksa bukan hanya sampelnya.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari perspektif pemeriksaan akuntansi, salah satu implikasi paling signifikan dari AI adalah potensinya untuk mengubah paradigma pengambilan sampel dalam audit. Standar audit saat ini memberikan panduan tentang bagaimana menentukan ukuran sampel yang representatif. Dengan AI, yang memungkinkan pemeriksaan atas 100% populasi transaksi dalam waktu yang jauh lebih singkat, konsep pengambilan sampel tradisional mungkin perlu ditinjau ulang secara fundamental.

Namun, ada dimensi yang sering diabaikan dalam diskusi AI untuk audit, yaitu masalah explainability atau kemampuan menjelaskan hasil yang dihasilkan oleh sistem. Ketika algoritma machine learning mengidentifikasi suatu transaksi sebagai mencurigakan, auditor harus dapat menjelaskan kepada klien dan kepada pengadilan (jika diperlukan) mengapa transaksi tersebut dianggap berisiko. Beberapa algoritma AI yang paling akurat, seperti deep learning, adalah 'black box' yang sangat sulit dijelaskan cara kerjanya secara transparan, sebuah karakteristik yang berbenturan langsung dengan prinsip dokumentasi dan justifikasi dalam standar audit.

Implementasi AI juga memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas profesional auditor. Jika AI membuat kesalahan dalam mengidentifikasi atau melewatkan suatu kecurangan, siapa yang bertanggung jawab: auditor yang menggunakan AI tersebut, atau pengembang sistem AI? Pertanyaan ini belum mendapat jawaban yang jelas dalam regulasi profesi audit saat ini, dan ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan risiko hukum dan etis yang signifikan.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan artikel ini adalah cakupannya yang komprehensif dalam menggambarkan berbagai aplikasi AI dalam audit, dari yang paling sederhana (RPA untuk pengolahan data) hingga yang paling canggih (*machine learning* untuk deteksi *Fraud*). Ini memberikan

gambaran yang luas tentang perkembangan teknologi yang sedang membentuk masa depan audit. Artikel ini juga mengakui adanya keterbatasan dan tantangan dalam implementasi AI, sehingga tidak terjebak pada narasi yang terlalu optimistis.

Kelemahannya adalah kurangnya pembahasan tentang implikasi etis dan regulatoris dari penggunaan AI dalam audit. Aspek-aspek seperti privasi data, bias algoritma, dan akuntabilitas profesional hanya disinggung sekilas tanpa eksplorasi yang mendalam. Dalam konteks pemeriksaan akuntansi yang memiliki implikasi hukum dan etis yang serius, keterbatasan ini cukup signifikan.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Adopsi AI dalam audit di Indonesia masih berada pada tahap awal. Beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) besar yang merupakan afiliasi dari jaringan internasional (*Big Four*) sudah mulai menggunakan berbagai alat analitik berbasis AI, namun KAP menengah dan kecil yang mendominasi pasar audit Indonesia sebagian besar masih menggunakan pendekatan tradisional. Kesenjangan teknologi ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan kualitas audit yang semakin lebar antara KAP besar dan kecil.

Dari sisi regulasi, OJK dan IAPI belum mengeluarkan panduan yang spesifik tentang penggunaan AI dalam proses audit, sehingga penggunaannya masih berada dalam zona abu-abu regulasi. Ini adalah area yang perlu segera diisi agar penggunaan AI dalam audit berkembang secara tertib dan bertanggung jawab.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Saya memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap narasi tentang AI dalam audit yang cenderung terlalu optimistis. AI memang menawarkan kemampuan yang luar biasa dalam menganalisis data, namun audit pada dasarnya adalah kegiatan yang memerlukan judgment, skeptisisme profesional, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang belum dapat direplikasi sepenuhnya oleh AI. Auditor yang baik bukan hanya mahir menganalisis data, tetapi juga mampu membaca situasi, memahami dinamika bisnis klien, dan membuat penilaian dalam kondisi ketidakpastian.

Saya juga melihat bahwa AI membawa potensi risiko *overreliance* yang serius. Jika auditor terlalu mengandalkan hasil analisis AI tanpa menerapkan judgment profesionalnya sendiri, maka ketika AI salah (yang pasti akan terjadi pada suatu titik), auditor tidak akan memiliki mekanisme deteksi dini yang memadai. Oleh karena itu, kompetensi dalam

menggunakan AI dalam audit harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang keterbatasan dan asumsi-asumsi yang mendasari sistem AI yang digunakan.

H. Kesimpulan

AI dan automasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Namun, realisasi potensi ini memerlukan lebih dari sekedar adopsi teknologi: diperlukan juga pengembangan kerangka regulasi yang sesuai, pembaruan standar audit yang mengakomodasi penggunaan AI, dan transformasi kompetensi auditor yang mampu berkolaborasi efektif dengan sistem AI. Indonesia perlu bergerak proaktif dalam semua dimensi ini agar tidak tertinggal dari perkembangan global yang sedang berlangsung dengan sangat cepat.

PEMBAHASAN SUMBER 9

A. Identitas Sumber

| | |
|---------------------|---|
| Judul | Systematic Literature Review: Pengaruh <i>Whistleblowing system</i> Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>) |
| Penulis | Ayuning Tiyas, Nurpinayu Naharia Putri, Dr. Dien Noviany Rahmatika. |
| Nama Jurnal | Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi |
| Tahun Terbit | 2024 |
| Volume/Nomor | Vol. 2, No 8, Hal 697-703 |

B. Pendahuluan

Dalam upaya pencegahan *Fraud* yang semakin kompleks, *whistleblowing system* atau sistem pelaporan pelanggaran telah mendapatkan pengakuan yang semakin luas sebagai salah satu alat pencegahan dan deteksi kecurangan yang paling efektif. Konsepnya sederhana: memberikan saluran yang aman, terlindungi, dan terpercaya bagi individu yang mengetahui adanya pelanggaran atau kecurangan untuk melaporkannya tanpa risiko pembalasan. Namun di balik kesederhanaan konsep ini, implementasinya menghadirkan tantangan yang cukup kompleks.

Sumber kesembilan ini merupakan *systematic literature review* yang berusaha merangkum dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian tentang pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Pendekatan *systematic literature review* dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dibandingkan dengan studi kasus tunggal.

C. Ringkasan Isi Sumber

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai studi tentang *whistleblowing system* dan hubungannya dengan pencegahan kecurangan akuntansi. Dari sejumlah penelitian yang dikaji, temuan dominan menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan atau *Fraud*. Berbagai penelitian yang direview mencakup pengaruh *whistleblowing system* dengan berbagai moderator dan

mediator, seperti pengendalian internal, moralitas individu, *corporate governance*, dan kompetensi sumber daya manusia.

Artikel ini mengidentifikasi beberapa kategori penelitian berdasarkan fokusnya: pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *Fraud* (yang mendominasi, sebanyak 58% dari total literatur yang dikaji), pentingnya *whistleblowing system*, pencegahan *Fraud* melalui *whistleblowing system* dan kesadaran anti-*Fraud*, serta efektivitas implementasi *whistleblowing system*. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang bagaimana komunitas akademis memandang fenomena *whistleblowing* dalam kaitannya dengan pencegahan *Fraud*.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Dari perspektif pemeriksaan akuntansi, *whistleblowing system* sesungguhnya berfungsi sebagai mekanisme deteksi *Fraud* yang komplementer terhadap audit formal. Jika audit formal bekerja berdasarkan sampel dan prosedur yang terstruktur, *whistleblowing system* bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang-orang yang berada di dalam organisasi dan memiliki pengetahuan langsung tentang apa yang terjadi. Kombinasi keduanya menciptakan sistem pertahanan berlapis yang jauh lebih efektif dibandingkan jika hanya mengandalkan salah satunya.

Efektivitas *whistleblowing system* dalam konteks pencegahan *Fraud* juga dapat dilihat dari efek deterensinya. Ketika karyawan dan pihak terkait mengetahui bahwa terdapat saluran pelaporan yang aman dan efektif, mereka yang berniat melakukan kecurangan akan berpikir ulang karena meningkatnya risiko terdeteksi. Efek pencegahan ini adalah salah satu cara utama di mana *whistleblowing system* berkontribusi pada pencegahan *Fraud*, karena membuat orang yang berniat curang berpikir dua kali sebelum bertindak.

Namun, efektivitas *whistleblowing system* sangat bergantung pada beberapa kondisi prasyarat: pertama, adanya jaminan perlindungan yang nyata bagi pelapor dari risiko pembalasan; kedua, adanya mekanisme tindak lanjut yang transparan dan konsisten terhadap setiap laporan yang masuk; dan ketiga, adanya budaya organisasi yang mendorong pelaporan dan tidak memandang *whistleblower* sebagai pengkhianat. Tanpa ketiga prasyarat ini, *whistleblowing system* akan berakhir sebagai formalitas belaka yang tidak efektif.

E. Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan utama sumber ini adalah penggunaan pendekatan *systematic literature review* yang memberikan gambaran berbasis bukti yang lebih luas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mensintesis temuan dari berbagai penelitian, artikel ini menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dan dapat diandalkan dibandingkan studi tunggal. Klasifikasi literatur berdasarkan tema juga membantu pembaca memahami pola dan kecenderungan dalam penelitian tentang *whistleblowing*.

Kelemahannya adalah bahwa meta-analisis dari literatur yang beragam sering mengabaikan perbedaan konteks yang signifikan antar penelitian. Faktor-faktor seperti ukuran organisasi, sektor industri, budaya nasional, dan sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan efek *whistleblowing system* yang sangat berbeda. Generalisasi kesimpulan tanpa mempertimbangkan variasi konteks ini berpotensi menghasilkan rekomendasi yang kurang tepat.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Di Indonesia, regulasi *whistleblowing system* telah ada sejak cukup lama, terutama di sektor publik melalui berbagai peraturan KPK dan pemerintah. Namun implementasinya masih belum optimal. Banyak organisasi memiliki mekanisme pelaporan yang secara formal ada, tetapi dalam praktiknya tidak berfungsi efektif karena kurangnya kepercayaan karyawan terhadap keamanan mekanisme tersebut dan kurangnya tindak lanjut yang konsisten.

Di sektor swasta, kewajiban *whistleblowing system* belum diatur secara eksplisit untuk semua jenis perusahaan. Meskipun OJK telah mendorong penerapannya di perusahaan publik melalui ketentuan *good corporate governance*, implementasinya masih sangat bervariasi.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Saya berpendapat bahwa keberhasilan *whistleblowing system* tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan organisasi. Pemimpin yang berintegritas akan menciptakan lingkungan di mana *whistleblowing* dipandang sebagai tindakan yang bertanggung jawab dan dihargai, bukan sebagai tindakan yang mengancam solidaritas organisasi. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki komitmen terhadap integritas akan, secara langsung atau tidak langsung, menciptakan budaya yang mematikan keberanian untuk melapor.

Saya juga melihat bahwa teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan efektivitas *whistleblowing system*. Platform pelaporan digital yang menjamin anonimitas penuh, menggunakan enkripsi end-to-end, dan memberikan nomor tiket yang dapat dilacak pelapor untuk memantau perkembangan laporannya, dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan karyawan untuk menggunakan sistem tersebut. Inovasi teknologi semacam ini perlu didorong dan difasilitasi oleh regulator maupun asosiasi profesi di Indonesia.

H. Kesimpulan

Systematic literature review ini memberikan konfirmasi yang berbasis bukti bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Temuan ini konsisten di berbagai konteks dan setting penelitian, meskipun besarnya efek bervariasi tergantung pada kondisi-kondisi prasyarat yang ada. Bagi Indonesia, ini adalah sinyal yang kuat bahwa investasi dalam membangun dan memperkuat *whistleblowing system* yang efektif adalah langkah yang tepat dan perlu diprioritaskan, baik di sektor publik maupun swasta.

PEMBAHASAN SUMBER 10

A. Identitas Sumber

| | |
|------------------------|---|
| Jenis Dokumen | Laporan Keuangan Konsolidasian Beserta Laporan Auditor Independen |
| Nama Perusahaan | PT Metro Realty Tbk dan Entitas Anak |
| Periode | Per 31 Desember 2023 dan 2022 |
| Mata Uang | Rupiah Indonesia |
| Sektor | Properti (Real Estate) |

B. Pendahuluan

Setelah membahas sembilan sumber yang bersifat akademis dan konseptual, sumber kesepuluh ini hadir sebagai kontras yang menarik: sebuah dokumen praktis yang menunjukkan seperti apa pemeriksaan akuntansi sesungguhnya diterapkan dalam dunia nyata. Laporan auditor independen adalah produk akhir dari proses audit laporan keuangan, sebuah dokumen yang di balik kesederhanaan formatnya menyimpan proses panjang, kompleks, dan penuh pertimbangan profesional.

PT Metro Realty Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan laporan auditor independen yang menyertainya menjadi objek analisis dalam pembahasan ini. Menelaah laporan auditor independen dari perusahaan nyata adalah cara terbaik untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip teoritis audit diterjemahkan ke dalam praktik yang konkret.

C. Ringkasan Isi Sumber

Dokumen ini terdiri dari laporan auditor independen yang disertai laporan keuangan konsolidasian lengkap meliputi: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Beberapa angka kunci dari laporan keuangan 2023 memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan:

Total aset PT Metro Realty Tbk per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp55,22 miliar, menurun dari Rp61,88 miliar pada tahun sebelumnya. Perusahaan mencatat pendapatan sebesar Rp25,52 miliar pada 2023, naik dari Rp21,75 miliar pada 2022. Meski pendapatan

meningkat, perusahaan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp7,27 miliar pada 2023, dibandingkan rugi Rp6,95 miliar pada 2022. Saldo laba belum ditentukan penggunaannya menunjukkan defisit yang semakin dalam, yaitu negatif Rp31,87 miliar pada 2023 dari negatif Rp24,77 miliar pada 2022. Ekuitas total perusahaan adalah Rp29,17 miliar, menurun signifikan dari Rp36,29 miliar.

D. Analisis Pemeriksaan yang Dibahas

Membaca laporan auditor independen PT Metro Realty Tbk memberikan kesempatan untuk menelaah secara langsung bagaimana auditor mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada publik. Formatnya yang terstruktur mencerminkan standar pelaporan yang berlaku, yaitu Standar Audit (SA) yang diterbitkan oleh IAPI, yang mengatur apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan auditor.

Kondisi keuangan PT Metro Realty Tbk yang perlu mendapat perhatian serius dari perspektif audit adalah akumulasi kerugian yang terus bertambah. Dengan defisit saldo laba yang mencapai negatif Rp31,87 miliar dan ekuitas yang terus menyusut dari tahun ke tahun, muncul pertanyaan tentang keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan ini. *Going concern* adalah salah satu hal yang paling kritis yang harus dinilai auditor: apakah perusahaan yang diaudit memiliki kemampuan untuk terus beroperasi dalam jangka waktu yang dapat diperkirakan?

Dari laporan arus kas, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi bernilai negatif (Rp3,82 miliar), yang berarti operasi perusahaan tidak mampu menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri. Arus kas investasi juga negatif karena adanya perolehan aset tetap, sementara arus kas dari aktivitas pendanaan perlu ditelaah lebih lanjut. Pola arus kas seperti ini adalah salah satu indikator yang biasanya memicu auditor untuk melakukan prosedur tambahan terkait *going concern*.

Dari sudut pandang audit laporan keuangan, perusahaan properti seperti PT Metro Realty memiliki karakteristik risiko yang spesifik. Aset utamanya berupa properti investasi yang valuasinya bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian independen. Pendapatan yang diakui dari sewa dan penjualan properti memerlukan pemeriksaan kontrak yang cermat untuk memastikan pengakuan pendapatan yang tepat sesuai PSAK 72. Piutang usaha dan uang muka pelanggan juga perlu dievaluasi penilaian kolektibilitasnya secara cermat.

E. Kelebihan dan Kelemahan (Format Laporan)

Dari sisi kelebihan, laporan keuangan ini menyajikan data secara bilingual (bahasa Indonesia dan Inggris) yang memudahkan pembaca internasional untuk memahaminya. Penyajian komparatif dua tahun (2023 dan 2022) juga memungkinkan pembaca untuk melihat tren kinerja keuangan perusahaan. Adanya catatan atas laporan keuangan yang cukup rinci juga membantu pembaca memahami kebijakan akuntansi yang diterapkan dan detail dari pos-pos laporan keuangan yang signifikan.

Dari sisi kelemahan, kondisi keuangan perusahaan yang terus merugi selama beberapa tahun berturut-turut dan penyusutan ekuitas yang signifikan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam tekanan keuangan yang serius. Dalam konteks audit, situasi ini tentu meningkatkan tingkat risiko audit secara keseluruhan dan memerlukan perhatian khusus dari auditor, terutama dalam hal penilaian *going concern* dan kecukupan pengungkapan yang berhubungan dengannya.

F. Relevansi dengan Praktik di Indonesia

Laporan auditor independen PT Metro Realty Tbk merupakan contoh nyata produk pemeriksaan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Mempelajari laporan seperti ini sangat penting bagi mahasiswa akuntansi karena memberi gambaran tentang seperti apa output nyata dari proses audit, bagaimana informasi keuangan disajikan kepada publik, dan apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menelaah kondisi keuangan suatu perusahaan.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, laporan auditor independen adalah dokumen publik yang dapat diakses oleh siapa saja melalui situs BEI. Kualitas dan kredibilitas laporan ini sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, standar kualitas audit yang tinggi dan konsisten adalah prasyarat mutlak bagi berfungsinya pasar modal yang efisien dan dapat dipercaya.

G. Pendapat dan Analisis Pribadi

Menelaah laporan keuangan PT Metro Realty Tbk dari sudut pandang pemeriksaan akuntansi, penulis menemukan beberapa hal yang menarik perhatian. Pertama, akumulasi kerugian yang terus tumbuh dan arus kas operasi yang negatif selama beberapa tahun adalah sinyal yang tidak dapat diabaikan. Dalam standar audit, auditor diwajibkan untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk

mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika keraguan tersebut ada, auditor harus mengungkapkannya secara transparan dalam laporan auditnya.

Kedua, dalam konteks sektor properti yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan siklus pasar properti, auditor perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis klien dan industri tempatnya beroperasi. Penurunan total aset dari Rp61,88 miliar menjadi Rp55,22 miliar dalam satu tahun adalah perubahan yang cukup signifikan dan perlu diinvestigasi penyebabnya. Apakah ini mencerminkan penurunan nilai aset yang wajar? Apakah terdapat aset yang seharusnya dicatat tetapi tidak dicatat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah bagian dari proses audit yang kritis dan mendalam.

Ketiga, perusahaan yang terus merugi pada akhirnya akan menghadapi tantangan likuiditas. Dengan total liabilitas sebesar Rp26,05 miliar dan ekuitas yang terus menyusut, rasio leverage perusahaan meningkat dari waktu ke waktu. Auditor perlu memverifikasi apakah semua liabilitas sudah dicatat dengan tepat, apakah ada kewajiban potensial (*contingent liabilities*) yang belum diungkapkan, dan apakah penilaian aset, khususnya properti investasi, sudah dilakukan dengan menggunakan asumsi yang konservatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Kesimpulan

Laporan auditor independen PT Metro Realty Tbk memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pemeriksaan akuntansi diterapkan dalam konteks perusahaan publik yang nyata dengan kondisi keuangan yang penuh tantangan. Kondisi keuangan perusahaan yang terus merugi dan arus kas operasi negatif menjadi pengingat bahwa audit bukan sekadar memeriksa kebenaran angka-angka, tetapi juga menilai keberlangsungan usaha dan memberikan informasi yang bermakna kepada para pemangku kepentingan. Dari analisis ini, penulis semakin memahami betapa krusialnya peran auditor independen dalam menjaga integritas informasi keuangan yang beredar di pasar modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma, A. D., Hayati, T., Bangun, R., Muchsin, M. A. H., & Marpaung, G. H. (2026). Optimalisasi peran audit internal dan pengendalian internal dalam pencegahan fraud di sektor publik Indonesia: Studi komparatif dan pengembangan model. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(1), 204-211.
- Erfandi, M., & Herlianto, R. (2024). Manfaat audit dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, 2(9), 677-682.
- Fadhlihi, A., Yufantia, F., & Etika, C. (2025). Sharia audit in Indonesia: Implementation, challenges, and future prospects. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 9(2), 139-157.
- Hasman, H., Putri, Y. M., Arifin, R. A. R., & Junaedi, A. S. (2025). Peran audit internal dalam peningkatan tata kelola (good governance) di sektor publik. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 17(3), 2024–2035.
- PT Metro Realty Tbk. (2024). *Laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 2022*. Jakarta: PT Metro Realty Tbk.
- Ray, A. N. P., & Taqwa, S. (2025). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit terhadap audit delay: Studi empiris pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI tahun 2020-2023. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(2), 690–706.
- Safitri, H., Dermawan, Arba, I., & Wahyuni. (2025). Audit readiness atas laporan keberlanjutan: Tantangan baru bagi auditor di era ESG disclosure. *Musyteri: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 20(9).
- Safitri, S., & Soeratin, H. Z. (2024). Implementasi artificial intelligence dan automation dalam proses audit. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(1), 23-33.
- Salim, A., Sutedjo, G. I., & Siallagan, C. N. (2025). Menuju audit ESG berkualitas dan transparan: Optimalisasi implementasi audit ESG dengan Robotic Process Automation. *Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA)*, 2(1), 138-153.
- Tiyas, A., Putri, N. N., & Rahmatika, D. N. (2024). Systematic Literature Review: Pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan akuntansi (fraud). *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(8), 697–703.